

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**





SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

- Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.211.894.855.731,00 (empat trilyun dua ratus sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp928.680.252.910,00 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.550.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.862.544.920,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.439.012.400,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp525.828.695.590,00 (lima ratus dua puluh

lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

- (6) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.550.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan Jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.350.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah).
 - (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 6

Rincian anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.862.544.920,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.964.610.960,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.626.485.960,00 (empat milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.271.448.000,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Rincian anggaran Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.439.012.400,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); dan
 - b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah./BUMD (Bidang Air Minum).
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.939.012.400,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).
- 3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah./BUMD (bidang air minum)

sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Rincian anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan Rp525.828.695.590,00 (lima ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian; dan
 - h. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.262.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.240.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp462.440.955.590,00 (empat ratus enam puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 12

Rincian anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.283.214.602.821,00 (tiga trilyun dua ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.014.727.498.000,00 (tiga trilyun empat belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.487.104.821,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Rincian anggaran Pendapatan hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.366.082.997.767,00 (empat trilyun tiga ratus enam puluh enam milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp3.432.504.654.706 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.597.170.669.748,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.480.460.989.604,00 (satu trilyun empat ratus delapan puluh milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp331.735.392.554,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.137.602.800,00 (dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 19

Rincian anggaran Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp. 379.707.511.752,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.670.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 97.472.868.423,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 105.738.332.087,00 (seratus lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.715.589.110,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.965.980.989,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.144.741.143,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 21

Rincian anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp528.870.831.309,00 (lima ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.991.948.492,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.878.882.817,00 (lima ratus lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 24

Rincian anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp154.188.142.036,00 (seratus lima puluh empat milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.188.142.036,00 (seratus enam puluh sembilan milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah),
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah),

Pasal 26

Rincian anggaran Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HADI SASMITO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZA NURRUFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004



LAMPIRAN I



KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	928.680.252.910,00
4.1.01	Pajak Daerah	345.550.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	26.200.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.200.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.200.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	4.000.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	4.000.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	10.350.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.350.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.350.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	95.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	95.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	95.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.000.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.000.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	20.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	20.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	80.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	80.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	49.862.544.920,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	29.964.610.960,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	362.632.640,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	362.632.640,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.000.000,00
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	8.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.872.582.600,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.872.582.600,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.724.986.120,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.167.517.908,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.929.561.480,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.627.906.732,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.808.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	2.808.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.584.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.584.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.626.485.960,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	323.932.800,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	102.040.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	101.192.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	108.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	12.700.800,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	43.887.960,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	28.919.160,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	14.968.800,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	527.083.200,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	527.083.200,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.500.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	157.500.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.149.922.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.149.922.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	315.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	180.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	135.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.271.448.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.000.000,00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	20.000.000,00
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	12.000.000.000,00
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	12.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.240.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.240.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.439.012.400,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.939.012.400,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.939.012.400,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	525.828.695.590,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.262.500.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.262.500.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.262.500.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	35.000.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	35.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	9.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.450.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.450.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.450.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	11.100.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.500.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000.000,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.100.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	500.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	200.000.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	100.000.000,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.050.000.000,00
4.1.04.15.08.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	50.000.000,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.000.000,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.000.000,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000,00
4.1.04.15.08.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK	30.000.000,00
4.1.04.15.08.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	600.000.000,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.000.000.000,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.000.000.000,00
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.000.000.000,00
4.1.04.15.09.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.000.000.000,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000.000,00
4.1.04.15.10.0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	500.000.000,00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	462.440.955.590,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	462.440.955.590,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	462.440.955.590,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.283.214.602.821,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.014.727.498.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.694.897.627.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	191.772.993.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.000.089.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	27.429.551.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	115.785.297.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	26.224.728.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	62.575.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.343.497.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.042.290.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.884.966.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.793.208.947.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	246.224.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.119.343.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.405.020.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.549.936.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.748.213.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.870.390.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	29.599.857.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	35.081.697.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.988.644.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.652.659.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.360.000.000,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	4.434.013.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.830.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	225.401.885.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.027.561.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	193.193.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	21.411.970.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.286.900.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	237.903.360.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	7.155.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	41.996.800.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	675.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.652.540.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.034.056.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	398.237.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26.397.189.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	319.829.871.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	319.829.871.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	319.829.871.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	257.405.562.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	60.562.736.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.018.947.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	60.185.503.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	356.250.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	106.282.126.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.081.542.821,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.081.542.821,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pendapatan	4.211.894.855.731,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.432.504.654.706,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.597.170.669.748,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.010.568.305.454,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	728.476.955.217,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	541.990.216.265,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	186.486.738.952,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	71.555.299.330,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	52.525.020.514,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.030.278.816,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.307.578.733,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.307.578.733,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.506.786.072,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.506.786.072,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.409.742.374,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.780.615.146,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.629.127.228,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.160.284.690,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	30.451.929.821,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.708.354.869,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.376.006.578,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.376.006.578,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.614.166,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.377.324,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.236.842,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.813.713.850,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	75.092.202.389,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.721.511.461,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.771.101.479,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.318.532.057,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	452.569.422,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.158.222.965,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.760.394.123,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.397.828.842,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	180.619.001.028,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	178.564.838.469,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	149.394.961.767,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	29.169.876.702,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.980.056.821,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.294.749.544,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	685.307.277,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	74.105.738,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	74.105.738,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	256.709.958.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.253.750.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	262.500.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	982.500.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	258.750.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.562.500.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	37.500.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.000.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	199.401.885.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	199.401.885.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.200.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.200.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.265.292.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.265.292.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.761.470.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.815.540.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.724.930.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	221.000.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	26.000.000.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	26.000.000.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	4.827.561.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	4.827.561.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.222.066.103,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	165.900.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	165.900.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	222.198.256,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	222.198.256,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	112.826.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	112.826.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.629.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.629.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.599.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.599.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.140.771,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.140.771,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.838.640.276,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.271.508,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.717.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.880.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.880.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.258.100.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.201.800,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.201.800,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.300.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.300.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.850.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.680.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.680.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.200,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.200,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.200.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.200.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.058.100.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	28.000.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	104.800.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.000.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	31.050.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	380.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	6.500.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.750.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	152.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	280.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.785.467.434,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.392.347.434,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.392.347.434,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	116.007.771.729,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	116.007.771.729,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	116.007.771.729,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.460.989.604,00
5.1.02.01	Belanja Barang	181.435.552.557,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	181.157.252.557,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.246.360.937,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.259.788.550,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.627.345.831,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	872.843.100,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	238.732.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	46.899.800,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	74.508.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.890.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.931.925.116,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.452.742.500,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	947.319.400,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	64.808.700,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	70.836.759,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	209.136.400,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	41.719.400,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.653.138.137,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.206.994.814,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.929.458.604,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	704.705.982,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.576.675.105,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.018.783.338,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.084.896.089,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.598.983.784,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	560.713.160,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.774.101.262,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.068.484.760,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.922.394.010,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	946.944.100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	42.655.714.100,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	885.397.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.787.400.501,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	308.575.804,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	135.570.000,00
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.843.001.514,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.278.255.700,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.627.193.300,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	22.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	725.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	194.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	553.014.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.846.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	262.550.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.500.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	14.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	335.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	944.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.231.950.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	167.900.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	50.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	31.500.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	31.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	246.800.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	143.200.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	694.382.917.850,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	477.352.041.078,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.941.103.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.047.930.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36.861.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	109.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.562.550.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	692.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	82.708.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	49.882.820.390,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.053.760.800,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.525.300.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	56.731.025,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.914.750.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	492.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.880.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.958.700.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.863.100.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.537.180.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.387.808.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.805.718.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.616.100.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	631.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.610.450.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	521.100.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	86.550.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	47.650.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.284.700.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	34.675.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.029.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.772.050.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.925.200.899,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	568.967.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	83.520.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	500.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.405.936.750,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.355.700.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	969.557.562,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	50.306.746.504,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	101.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.533.730.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	313.630.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	43.498.098,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.796.375.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.082.872.050,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	197.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.727.723.365,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.197.657.560,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	95.567.955.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.761.528.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.144.206.344,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.421.670.224,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.961.855.837,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	38.660.639.200,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	12.211.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	135.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	135.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.536.182.030,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.346.426.200,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	36.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.277.861.730,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	285.840.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	140.250.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	865.503.600,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	164.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	400.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	14.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.540.195.940,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	195.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	752.102.500,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	588.293.440,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.000.000,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.171.371.576,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	86.731.422,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	680.705.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.659.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	775.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.150.000.000,00
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	52.500.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	205.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.455.735.154,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	330.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	615.000.000,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	35.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	66.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.517.950.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	1.450.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	600.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.250.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.535.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	632.950.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.217.197.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.388.450.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	264.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.564.747.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	859.706.250,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.750.000,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	85.150.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.750.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	25.228.125,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	308.750.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.281.250,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.046.875,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.750.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.500.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	227.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	307.550.611,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	117.311.440,00
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.604.860,00
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	18.950.220,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.099.260,00
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	361.491,00
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.223.340,00
5.1.02.02.14.0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.218.249.665,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	31.981.993,00
5.1.02.03.01.0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.144.400,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	17.837.593,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.282.572.324,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	230.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	221.650.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.218.175.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.542.310.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	116.100.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	779.525.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.796.800,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	134.400.000,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	65.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	814.380.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.100.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	969.590.500,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.100.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	219.810.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.650.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	832.635.024,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	962.500.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	743.850.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.435.245.589,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.369.907.069,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.662.500.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.140.620,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	78.873.900,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	61.824.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	980.849.600,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	553.849.600,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	407.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	227.600.159,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	227.600.159,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	260.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	260.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.042.789.930,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.558.763.530,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.709.877.065,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.356.756.465,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.181.800.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	310.330.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	484.026.400,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	484.026.400,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.232.420.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.190.720.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	935.720.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	23.216.600.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	638.400.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	29.400.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.041.700.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.041.700.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	140.935.473.848,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	140.935.473.848,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	140.935.473.848,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.213.585.754,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.213.585.754,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.213.585.754,00
5.1.05	Belanja Hibah	331.735.392.554,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	224.977.067.554,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	138.439.577.301,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	64.033.873.500,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	74.405.703.801,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.102.662.800,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.102.662.800,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	83.859.827.453,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	83.859.827.453,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.575.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.575.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	56.472.000.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	252.800.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	252.800.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.227.440.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.227.440.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	34.991.760.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	34.991.760.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.124.785.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.124.785.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.124.785.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	44.161.540.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	42.419.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	42.419.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.742.540.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.742.540.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.296.300.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	13.296.300.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.296.300.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.841.302.800,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.841.302.800,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.841.302.800,00
5.2	BELANJA MODAL	379.707.511.752,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.670.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.670.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.637.607.300,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.574.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.200.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	374.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	63.607.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	63.607.300,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.939.320.200,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.513.644.600,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.176.081.300,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.711.719.200,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.272.097.500,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.049.888.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.303.858.600,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	425.675.600,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	425.675.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	37.858.100,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.702.400,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	24.702.400,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.285.700,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.285.700,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.870.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.765.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.105.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	520.462.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	520.462.500,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	512.500,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	300.750.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	219.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.246.478.022,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.643.388.818,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	381.500,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	257.677.760,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.872.476,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.183.457.082,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.527.524.404,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.552.236.848,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	54.867.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	881.296.946,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	25.636.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.987.639.167,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	25.847.543,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75.564.800,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.753.400,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.611.600,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	28.199.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.628.747.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.047.134.100,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.041.134.100,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	581.612.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	557.782.900,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	23.830.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.800.794.824,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.800.794.824,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.289.436.624,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.302.970.042,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	24.900.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	157.492.000,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.022.000.000,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	572.296.780,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.647.771.307,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	11.148.500,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.500.000,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	8.602.581.800,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	510.273.400,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	231.142.000,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.465.167.471,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.961.114.900,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.556.322.400,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	745.999.000,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	11.000.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	734.999.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	723.410.400,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	683.100.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	40.310.400,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	86.913.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	86.913.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.268.472.750,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.011.723.480,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	106.642.858,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.796.767.227,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	108.313.395,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.256.749.270,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.012.571.270,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.178.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	240.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	712.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	712.500.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	360.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	352.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.053.469.400,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.053.469.400,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	68.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	985.469.400,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.070.835.927,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.070.835.927,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.070.835.927,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	91.576.455.887,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.196.455.887,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	60.480.653.917,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.600.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	28.115.801.970,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	380.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	355.000.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	25.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	626.750.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	626.750.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	626.750.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	154.900.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	154.900.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	154.900.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.380.226.200,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.380.226.200,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.380.226.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	105.796.153.130,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.891.153.130,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	85.013.707.380,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	9.877.445.750,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	10.905.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.905.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.151.316.900,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.151.316.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.151.316.900,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.283.116.200,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.283.116.200,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.283.116.200,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.235.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.235.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.235.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.002.880,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.002.880,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.002.880,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	158.500.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	127.500.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	127.500.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	31.000.000,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	31.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.000.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.000.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.000.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.903.686.152,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.903.686.152,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.903.686.152,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	903.794.837,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	903.794.837,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	903.794.837,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	930.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	930.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	630.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	300.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	214.741.143,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	214.741.143,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	214.741.143,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	528.870.831.309,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.000.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.000.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.000.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.991.948.492,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.991.948.492,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.991.948.492,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	505.878.882.817,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	505.878.882.817,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	505.878.882.817,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	505.878.882.817,00
	Jumlah Belanja	4.366.082.997.767,00
	Total Surplus/(Defisit)	-154.188.142.036,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.188.142.036,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.188.142.036,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	169.188.142.036,00
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	169.188.142.036,00
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	169.188.142.036,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	154.188.142.036,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HADI SASMITO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

BUPATI JEMBER

ttd

HENDY S

Halaman 24

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZATNIROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004